

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor tentang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

_____, Undang-Undang Nomor tentang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

B. Buku

Djaenuri, M. Aries, Sistem Pemerintahan Daerah, Tangerang: UT, 2019.

Fahmi, Sudi, Hukum Otonomi Daerah, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2010.

H.R., Syaekani, Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, 2003.

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.

Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tata Usaha Peradilan Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

M. Hadjon, Philipus, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 2003.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan Desertasi, Cet II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Santoso, Lukman, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: KDT, 2013.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Siswanto dan Sunarmo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sj Sumarto, Hetifah, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Supasti, Ni Ketut, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Bali: Deepublish, 2016.

Sutedi, Adrian, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Hukum Bagi Si Miskin: Kasus Hukum Pertanian*, Bandung: Sidang Terbuka Universitas Katolik Parahyangan-Upacara Pengukuhan Guru Besar, 2007.

Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Yulia, *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

C. Lain-lain

Agus Kurniawan, I Gede, "Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak", I. Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar, Bali, 2013.

Davison, Mark, "The Function of Geographical Name in Trade", *Journal Of Law and Social Science*, (Faculty Of Law Padjajaran University), Vol. XVIII No. 1 Tahun 1988.

Johan Nasution, Bahder, "Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Demokrasi*, Vol. V No. 2, 2006.

Khairunnisa, Dina, "Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Pengurusan BUMN", *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009.

Lukito, Imam, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau)", *e-Journal Balibangkumham*, Vol.12 Tahun 2018.

Molnar Gabor, Mariana, "Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juni, 2012, h. 1; dikutip dari Miranda Risang Ayu, "Memperbincangkan hak kekayaan intelektual indikasi geografis", Bandung: P.T Alumni, 2006.

Nasution, Bahder Johan, "Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Demokrasi*, Vol. V No. 2, 2006.

Noviades, Dhils, "Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 1 Tahun 2013, Universitas Jambi.

Pantja Astawa, I Gede, "Peraturan Kebijakan Sebagai Salah Satu Bentuk Keputusan Administrasi Negara", *Jurnal Pro Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Tahun XVI, Bandung, Juli, 1998.

Risna Yessiningrum, Winda, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal IUS-Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 7, April, 2015.

Rudy, "Desentralisasi Indonesia Memupuk Demokrasi dan Penciptaan Tata Pemerintahan Lokal", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 1 No. 1, 2007.

Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Hukum Bagi Si Miskin: Kasus Hukum Pertanian, Sidang Terbuka Universitas Katolik Parahyangan-Upacara Pengukuhan Guru Besar*, Bandung, 2007.

Sudut Hukum, Perlindungan Hukum,
<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

Sumiyati, Yeti dkk, "Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)", (MIMBAR: *Jurnal Sosial dan Pembangunan*), Vol 24 No 1, 2008, Universitas Islam

Bandung.

Syafrudin, Ateng, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia*, Universitas Katolik Parahyangan, Edisi IV, Bandung, 2000.

Tesis Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

Warlan Yusuf, Asep, "Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem)", *Disertasi*, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Wawancara, Yudi Sulaeli, Kepala Bidang PPUP Dinas Tanaman Pangan, Holikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, 13 Desember 2023, Pukul 13.00 WIB.

<https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>, Diakses pada tanggal 15 Februari 2022.